

**ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DI KABUPATEN KARAWANG**
*(Studi Kasus Pada Program Bangga Kencana Melalui Kampung
Keluarga Berkualitas)*

Oleh :

Cici Nuraeni, Iwan Satibi²
^{1,2}, Universitas Pasundan Bandung
cinuraeni@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang dalam mendukung keberhasilan Program Bangga Kencana melalui Kampung Keluarga Berkualitas, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kinerja ASN, serta menganalisis upaya yang dilakukan DPPKB Kabupaten Karawang dalam meningkatkan kinerja aparatur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran ASN, khususnya Penyuluh Keluarga Berencana, dalam menerjemahkan kebijakan Program Bangga Kencana ke dalam kegiatan pembinaan, penyuluhan, pendampingan, fasilitasi, koordinasi, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat wilayah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Kampung Keluarga Berkualitas. Analisis kinerja menggunakan konsep kinerja Bernardin dan Russell yang meliputi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan terhadap pengawasan, dan dampak interpersonal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ASN DPPKB Kabupaten Karawang dalam mendukung Program Bangga Kencana melalui Kampung Keluarga Berkualitas telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan. ASN mampu melaksanakan tugas pembinaan, penyuluhan, pendampingan, koordinasi, pendataan, pelaporan, serta fasilitasi kegiatan di masyarakat. Faktor pendukung kinerja meliputi komitmen pimpinan, kompetensi ASN, dukungan pemerintah desa, keaktifan kader, koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah tenaga Penyuluh KB, luasnya wilayah binaan, beban kerja administratif, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, kendala jaringan internet, serta perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah desa. Dalam meningkatkan kinerja ASN, DPPKB melakukan berbagai upaya melalui peningkatan kompetensi, pembinaan, monitoring dan evaluasi, penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan peran kader dan pemerintah

desa, penerapan pendekatan komunikasi yang adaptif, optimalisasi sumber daya, serta penataan beban kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja ASN tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga membutuhkan dukungan organisasi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas ASN, pemerataan beban kerja, peningkatan dukungan operasional, penguatan kelembagaan Kampung Keluarga Berkualitas, serta koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan Program Bangga Kencana di Kabupaten Karawang.

Kata kunci: Kinerja ASN, Program Bangga Kencana, Kampung Keluarga Berkualitas, DPPKB, Kabupaten Karawang.

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of State Civil Apparatus (ASN) at the Population Control and Family Planning Office (DPPKB) of Karawang Regency in supporting the implementation of the Bangga Kencana Program through Quality Family Villages (Kampung Keluarga Berkualitas). The study focuses on the existing performance of ASN, supporting and inhibiting factors affecting performance, and the efforts undertaken by DPPKB Karawang Regency to improve ASN performance in achieving the success of the program. The study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observation, and documentation, while informants were selected using purposive sampling based on their involvement and knowledge of the implementation of the Bangga Kencana Program and Quality Family Villages. The findings indicate that the performance of ASN at DPPKB Karawang Regency is generally adequate and is reflected in their ability to carry out program-related tasks, including counseling, community assistance, coordination, data collection, facilitation, monitoring, and reporting. The performance of ASN can be examined through the dimensions of quality, quantity, timeliness, cost-effectiveness, need for supervision, and interpersonal impact. Several supporting factors contribute to ASN performance, including leadership commitment, employee competence, support from village governments, active participation of community cadres, cross-sectoral coordination, community involvement, and the utilization of information technology. Meanwhile, the main inhibiting factors include the limited number of Family Planning Counselors, relatively high workloads, limited operational budgets and facilities, unstable internet connectivity in certain areas, differences in community participation, variations in village government commitment, and changes in village personnel. To address these challenges, DPPKB Karawang Regency has undertaken various efforts, including competency development through training, coaching, and mentoring; strengthening monitoring and evaluation; improving internal and cross-sectoral coordination; utilizing information technology; strengthening the roles of village governments and community cadres; applying adaptive and persuasive communication approaches; optimizing available resources; and improving the distribution of ASN workloads. These efforts demonstrate that

improving ASN performance requires not only strengthening individual competencies but also developing organizational support and institutional collaboration. Therefore, the sustainable improvement of ASN performance is essential to strengthening the implementation of the Bangga Kencana Program through Quality Family Villages and ensuring that the program provides more effective and sustainable benefits for the community of Karawang Regency.

Keywords: *State Civil Apparatus Performance, Bangga Kencana Program, Quality Family Villages, DPPKB, Karawang Regency.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Program Bangga Kencana melalui Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Karawang merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program tersebut membutuhkan keterlibatan aparatur yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga melakukan pembinaan, penyuluhan, pendampingan, koordinasi, serta penggerakan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dengan demikian, keberhasilan program sangat berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam menerjemahkan kebijakan dan target organisasi menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan di lapangan.

Tabel 1 Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas

No.	Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung	Persentase
1	Dasar	9	2,91%
2	Berkembang	226	73,14%
3	Mandiri	23	7,44%
4	Berkelanjutan	51	16,50%
Total		309	100%

Sumber: Data Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas Jawa Barat, Agustus 2025.

Berdasarkan data klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas Jawa Barat per Agustus 2025, Kabupaten Karawang memiliki 309 Kampung Keluarga Berkualitas, yang terdiri atas 9 kampung klasifikasi dasar, 226 berkembang, 23 mandiri, dan 51 berkelanjutan. Dari jumlah tersebut, sekitar 73,14% masih berada pada klasifikasi berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas telah memiliki cakupan yang cukup luas, tetapi peningkatan kualitas dan keberlanjutan pelaksanaannya masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Tabel 2 Target dan Anggaran Program Bangga Kencana melalui Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2026

No.	Indikator	Target/Alokasi
1	Target Kampung Keluarga Berkualitas	205 kampung

No.	Indikator	Target/Alokasi
2	Anggaran kegiatan	± Rp2,407 miliar
3	Program	Bangga Kencana
4	Kegiatan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

Sumber: Rencana Kerja DPPKB Kabupaten Karawang Tahun 2026.

Kondisi tersebut juga terlihat dalam perencanaan DPPKB Kabupaten Karawang. Rencana Kerja DPPKB Tahun 2026 mencantumkan kegiatan “Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas” dengan target 205 Kampung Keluarga Berkualitas dan alokasi anggaran sekitar Rp2,407 miliar. Besarnya cakupan sasaran dan sumber daya yang dialokasikan menunjukkan bahwa program tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Karawang.

Namun demikian, luasnya cakupan program belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat keberlanjutan yang sama. Laporan Akuntabilitas Kinerja DPPKB Kabupaten Karawang Tahun 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas masih belum optimal. Salah satu persoalan yang diidentifikasi adalah adanya ego sektoral antarpemangku kepentingan. Selain itu, penelitian tahun 2026 mengenai implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa dari 309 kampung yang terbentuk, hanya **42 kampung atau sekitar 13,6%** yang mencapai klasifikasi berkelanjutan. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi persoalan pada aspek sumber daya dan struktur birokrasi serta menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan kapasitas pelaksana.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program Bangga Kencana tidak cukup diukur berdasarkan jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang telah terbentuk. Keberhasilan program juga berkaitan dengan bagaimana kegiatan dapat dikelola, dilaksanakan, dikembangkan, dan dipertahankan secara berkelanjutan. Pada titik ini, keberadaan aparatur sebagai pelaksana program menjadi penting karena ASN memiliki tugas untuk menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lapangan.

Dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana, ASN DPPKB dituntut memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai pekerjaan, mulai dari penyuluhan dan pendampingan hingga pengumpulan data, koordinasi lintas sektor, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Kinerja aparatur menjadi semakin penting karena pelaksanaan program melibatkan pemerintah daerah, kecamatan, desa atau kelurahan, kader, kelompok kegiatan, serta masyarakat. Ketidakefektifan koordinasi atau keterbatasan kemampuan aparatur dapat memengaruhi proses pencapaian target dan keberlanjutan program.

Bernardin dan Russell (2013) memandang kinerja sebagai catatan hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu dalam suatu periode. Kinerja tersebut dapat dilihat melalui enam dimensi, yaitu kualitas pekerjaan (*quality*),

kuantitas pekerjaan (*quantity*), ketepatan waktu (*timeliness*), efektivitas biaya (*cost-effectiveness*), kebutuhan terhadap pengawasan (*need for supervision*), dan dampak interpersonal (*interpersonal impact*). Sementara itu, Mangkunegara (2017) menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, dalam menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan.

Berdasarkan pandangan tersebut, kinerja ASN DPPKB dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana perlu dilihat tidak hanya dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari kualitas dan jumlah pekerjaan yang dihasilkan, ketepatan waktu, pemanfaatan sumber daya, kemampuan menjalankan tugas, serta hubungan kerja dengan berbagai pihak. Perspektif ini penting karena ASN merupakan salah satu unsur yang menentukan bagaimana kebijakan dan program pemerintah dapat diwujudkan menjadi pelayanan dan kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Secara lebih luas, penyelenggaraan pemerintahan daerah memang sangat bergantung pada kualitas sumber daya aparatur. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menempatkan ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Artinya, kinerja ASN menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah dapat dilaksanakan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Persoalan kinerja ASN dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana melalui Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Karawang menjadi penting untuk dikaji. Penelitian ini tidak hanya melihat hasil pelaksanaan program, tetapi secara khusus menganalisis bagaimana ASN DPPKB menjalankan tugasnya berdasarkan enam dimensi kinerja Bernardin dan Russell, sekaligus mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat kinerja serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kinerja aparatur sekaligus menjadi masukan bagi peningkatan pelaksanaan Program Bangga Kencana dan keberlanjutan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Karawang.

KAJIAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan proses pengelolaan sumber daya dan kegiatan pemerintahan untuk mencapai tujuan publik. Dalam pelaksanaannya, administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan aktivitas birokrasi, tetapi juga bagaimana pemerintah memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasolong (2019) menjelaskan bahwa administrasi publik berkaitan dengan kerja sama yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam mengelola dan melaksanakan kebijakan publik.

Dalam konteks penelitian ini, administrasi publik menjadi landasan untuk memahami pelaksanaan Program Bangga Kencana sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.

Manajemen Publik

Manajemen publik berkaitan dengan bagaimana organisasi pemerintah mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan tersebut mencakup sumber daya manusia, anggaran, sarana, informasi, serta koordinasi antaraktor. Osborne dan Gaebler (1992) menekankan pentingnya orientasi pada hasil dalam pengelolaan pemerintahan. Artinya, keberhasilan organisasi publik tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya kegiatan administratif, tetapi juga oleh hasil yang dapat dicapai.

Dalam penelitian ini, perspektif manajemen publik digunakan untuk melihat bagaimana DPPKB mengelola ASN dan berbagai sumber daya dalam mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana melalui Kampung Keluarga Berkualitas.

Aparatur Sipil Negara

ASN merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menekankan pentingnya profesionalitas, kompetensi, akuntabilitas, dan kinerja dalam manajemen ASN.

Dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana, ASN DPPKB memiliki peran dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam kegiatan di lapangan, seperti penyuluhan, pembinaan, pendampingan, koordinasi, pendataan, monitoring, dan evaluasi. Oleh karena itu, kemampuan ASN menjadi salah satu unsur penting dalam pencapaian tujuan program.

Kinerja

Kinerja merupakan gambaran mengenai hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mangkunegara (2017) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Wibowo (2017) menambahkan bahwa kinerja perlu diarahkan pada pencapaian hasil yang memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi.

Dalam organisasi publik, kinerja memiliki makna yang lebih luas karena hasil pekerjaan aparatur berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pasolong (2019) menjelaskan bahwa kinerja organisasi publik tidak hanya dinilai dari pencapaian target internal, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Dimensi Kinerja Bernardin dan Russell

Bernardin dan Russell (2013) menjelaskan kinerja melalui enam dimensi, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan terhadap pengawasan, dan dampak interpersonal. Keenam dimensi tersebut dapat digunakan untuk melihat kinerja ASN secara lebih menyeluruh.

Tabel 3 Dimensi Kinerja

Dimensi	Indikator dalam Penelitian
Kualitas (<i>Quality</i>)	Mutu hasil pembinaan, penyuluhan, pendampingan, dan pekerjaan ASN
Kuantitas (<i>Quantity</i>)	Jumlah kegiatan dan pekerjaan yang diselesaikan
Ketepatan waktu (<i>Timeliness</i>)	Ketepatan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan
Efektivitas biaya (<i>Cost-effectiveness</i>)	Pemanfaatan anggaran dan sumber daya secara efektif
Kebutuhan pengawasan (<i>Need for supervision</i>)	Kemampuan ASN menjalankan tugas secara mandiri
Dampak interpersonal (<i>Interpersonal impact</i>)	Kemampuan membangun komunikasi, koordinasi, dan hubungan kerja

Teori tersebut menjadi dasar utama untuk menganalisis kinerja ASN DPPKB dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana melalui Kampung Keluarga Berkualitas.

Kompetensi Aparatur

Kinerja aparatur juga berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan. Spencer dan Spencer (1993) memandang kompetensi sebagai karakteristik dasar individu yang berhubungan dengan efektivitas kinerja dalam pekerjaan. Kompetensi tidak hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga karakteristik yang mendukung seseorang dalam menjalankan tugas.

Dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana, ASN membutuhkan kompetensi teknis sekaligus kemampuan komunikasi, pengelolaan data, pendampingan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, kompetensi menjadi salah satu aspek yang mendukung pencapaian kinerja aparatur.

Komunikasi dalam Pelaksanaan Program

Komunikasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Mulyana (2017) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan untuk mencapai kesamaan pemahaman antara komunikator dan komunikan. Dalam Program Bangga Kencana, ASN perlu menyampaikan informasi mengenai keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan berbagai kegiatan program dengan cara yang dapat dipahami masyarakat.

Kemampuan komunikasi juga diperlukan dalam membangun hubungan dengan kader, pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, komunikasi menjadi bagian yang mendukung kualitas pekerjaan dan dampak interpersonal ASN.

Koordinasi dan Kolaborasi

Pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas melibatkan berbagai pihak sehingga membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa kolaborasi pemerintahan merupakan proses yang mempertemukan

berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja bersama dalam penyelesaian persoalan publik.

Dalam konteks DPPKB, koordinasi diperlukan antara ASN dengan pemerintah desa/kelurahan, kader, kelompok kegiatan, tenaga kesehatan, perangkat daerah, dan masyarakat. Kemampuan membangun koordinasi tersebut berkaitan dengan dimensi *interpersonal impact* dalam teori Bernardin dan Russell.

Program Bangga Kencana

Program Bangga Kencana merupakan program pemerintah dalam bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Pelaksanaan program diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk, pelayanan keluarga berencana, serta pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pelaksanaan program pada tingkat masyarakat membutuhkan peran aparatur sebagai pelaksana, fasilitator, pembina, dan penggerak. Karena itu, pencapaian tujuan Program Bangga Kencana berkaitan dengan kapasitas dan kinerja aparatur yang melaksanakan program tersebut.

Kampung Keluarga Berkualitas

Kampung Keluarga Berkualitas merupakan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan berbagai program pembangunan keluarga dan kependudukan di tingkat masyarakat. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, kader, serta berbagai sektor terkait.

Dalam penelitian ini, Kampung Keluarga Berkualitas diposisikan sebagai konteks pelaksanaan tugas ASN DPPKB. Kinerja ASN dilihat dari bagaimana aparatur menjalankan pembinaan, pendampingan, penyuluhan, fasilitasi, pendataan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam mendukung keberlangsungan program.

Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kinerja tidak terlepas dari pengembangan kemampuan aparatur. Armstrong (2020) menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan kemampuan individu sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap organisasi.

Dalam konteks DPPKB, pengembangan ASN dapat dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan, peningkatan kemampuan teknologi informasi, komunikasi, serta penguatan kemampuan koordinasi. Pengembangan tersebut menjadi bagian penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja aparatur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode studi kasus didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai kinerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana melalui Kampung Keluarga Berkualitas. Penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk mengetahui kondisi kinerja ASN secara umum, tetapi juga untuk memahami secara mendalam bagaimana aparatur

melaksanakan tugasnya, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja, serta upaya yang dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Karawang dalam meningkatkan kinerja aparatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja ASN dalam Pelaksanaan Program Bangga Kencana melalui Kampung Keluarga Berkualitas

Kualitas Pekerjaan

Kualitas pekerjaan ASN terlihat dari kemampuan melaksanakan pembinaan, pendampingan, penyuluhan, pengelolaan data, koordinasi, serta evaluasi kegiatan. ASN tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik masyarakat dan kebutuhan masing-masing wilayah. Penggunaan data sebagai dasar pelaksanaan kegiatan serta pendampingan kepada kader menunjukkan adanya upaya menjaga mutu pekerjaan.

Temuan tersebut sejalan dengan Bernardin dan Russell (2013) yang menempatkan kualitas sebagai ukuran sejauh mana hasil pekerjaan memenuhi tujuan dan standar yang ditetapkan. Mangkunegara (2017) juga menegaskan bahwa kinerja mencakup kualitas dan kuantitas hasil kerja sesuai tanggung jawab pegawai. Namun, kualitas pekerjaan masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah Penyuluh KB, luasnya wilayah binaan, serta dukungan operasional yang belum sepenuhnya memadai.

Kuantitas Pekerjaan

Kuantitas pekerjaan ASN tergolong cukup baik, ditunjukkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan, pendampingan, pendataan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Tingginya volume pekerjaan terutama dirasakan oleh Penyuluh KB yang harus menangani beberapa wilayah binaan sekaligus.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, ASN menerapkan skala prioritas, menyesuaikan jadwal kegiatan, serta memanfaatkan dukungan kader dan pemerintah desa. Pembagian peran tersebut membantu memperluas jangkauan program. Meskipun demikian, keterbatasan jumlah tenaga penyuluh, banyaknya pekerjaan administratif, dan kondisi jaringan internet masih menjadi kendala dalam meningkatkan volume pekerjaan secara optimal. Temuan ini sesuai dengan Bernardin dan Russell (2013) bahwa kuantitas berkaitan dengan jumlah atau volume pekerjaan yang mampu dihasilkan pegawai.

Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu ASN tergolong cukup baik. ASN berusaha melaksanakan kegiatan berdasarkan jadwal dan target yang telah ditetapkan. Namun, pelaksanaan kegiatan di lapangan sering menghadapi perubahan agenda pemerintah desa, kesiapan kader, serta keterbatasan waktu masyarakat. Dalam menghadapi kondisi tersebut, ASN melakukan penyesuaian jadwal dan mengintegrasikan kegiatan Bangga Kencana dengan kegiatan masyarakat yang telah tersedia.

Penggunaan komunikasi digital juga membantu mempercepat koordinasi dan penyampaian perubahan jadwal. Akan tetapi, keterbatasan jaringan internet di

beberapa wilayah dapat menghambat proses pelaporan dan pengiriman data. Dengan demikian, ketepatan waktu tidak hanya ditentukan oleh kedisiplinan individu, tetapi juga oleh kemampuan organisasi mengatur beban kerja, koordinasi, dan dukungan sarana.

Efektivitas Biaya dan Pemanfaatan Sumber Daya

Efektivitas biaya terlihat dari kemampuan ASN memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menjaga kegiatan tetap berjalan. Keterbatasan sarana dan operasional diatasi melalui pemanfaatan fasilitas pemerintah desa, dukungan kader, serta penggunaan media komunikasi digital. Pola tersebut menunjukkan adanya upaya mengoptimalkan sumber daya tanpa selalu bergantung pada tambahan fasilitas.

Dalam perspektif Bernardin dan Russell (2013), efektivitas biaya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan pekerjaan dengan penggunaan sumber daya secara efektif. Dalam konteks penelitian, efisiensi tersebut tercermin dari pemanfaatan fasilitas lokal, pembagian peran dengan kader, integrasi kegiatan, dan penggunaan teknologi untuk mengurangi kebutuhan koordinasi tatap muka.

Kebutuhan terhadap Pengawasan

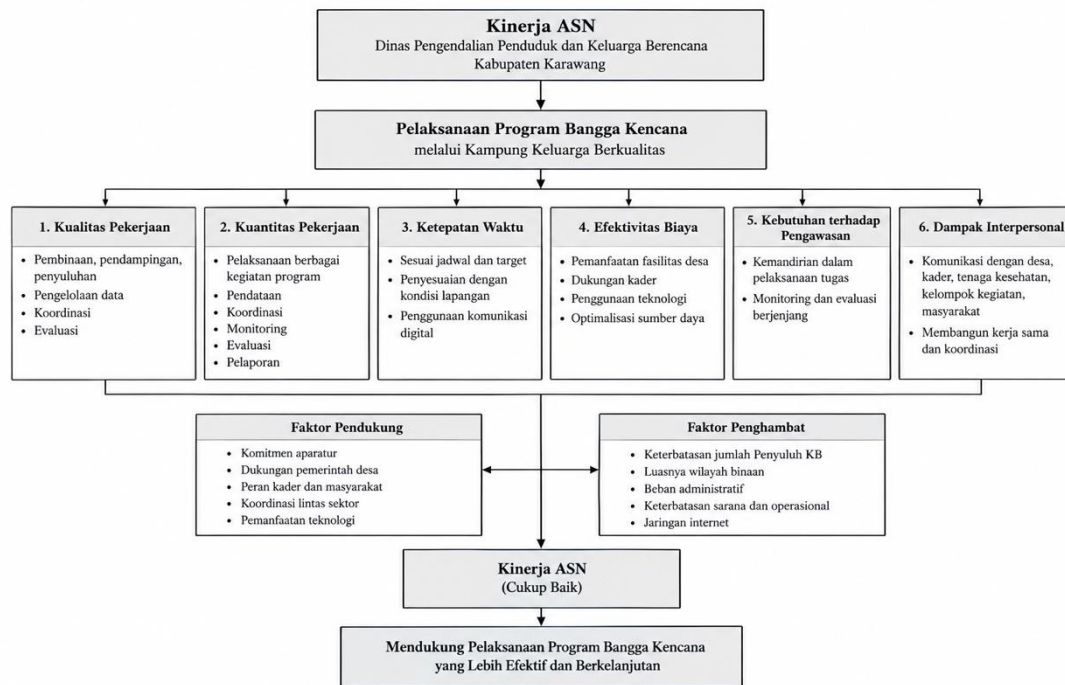
Dimensi kebutuhan terhadap pengawasan menunjukkan bahwa ASN telah memiliki tingkat kemandirian yang cukup dalam menjalankan tugas. Penyuluh KB dapat melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pendampingan berdasarkan kondisi wilayahnya, tetapi tetap berada dalam mekanisme monitoring dan evaluasi DPPKB.

Pengawasan dilakukan secara berjenjang untuk mengetahui perkembangan kegiatan, capaian, serta hambatan yang muncul di lapangan. Dengan demikian, pengawasan tidak semata-mata berfungsi mengontrol ASN, tetapi juga menjadi mekanisme untuk memberikan arahan dan tindak lanjut terhadap persoalan yang ditemukan. Kondisi ini menunjukkan keseimbangan antara kemandirian aparatur dan kontrol organisasi.

Dampak Interpersonal

Dampak interpersonal merupakan salah satu aspek yang cukup menonjol dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana. ASN harus membangun hubungan kerja dengan pemerintah desa, kader, kelompok kegiatan, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Kemampuan komunikasi menjadi penting karena karakteristik dan tingkat pemahaman masyarakat berbeda-beda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dilakukan melalui pertemuan langsung maupun media digital. ASN berperan memberikan informasi, menjelaskan administrasi, membantu menyelesaikan permasalahan, serta mengoordinasikan kegiatan. Temuan tersebut sejalan dengan Mulyana (2017) yang memandang komunikasi sebagai proses untuk mencapai pemahaman bersama. Dengan demikian, kemampuan interpersonal ASN mendukung terbentuknya koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas.



Gambar 1 Bagan Kinerja ASN dalam Pelaksanaan Program Bangga Kencana Faktor Pendukung dan Penghambat

Kinerja ASN dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana melalui Kampung Keluarga Berkualitas dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung meliputi komitmen aparatur, pembinaan berkelanjutan, dukungan pemerintah desa, keaktifan kader, koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi komunikasi. Faktor-faktor tersebut membantu ASN melaksanakan pembinaan, pendampingan, penyuluhan, pendataan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh dukungan lingkungan kerja.

Komitmen aparatur dan pembinaan berkelanjutan menjadi modal penting dalam mempertahankan pelaksanaan program di tengah keterbatasan tenaga dan luas wilayah binaan. Mangkunegara (2017) menjelaskan bahwa kinerja pegawai berkaitan dengan kemampuan dan motivasi dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam konteks penelitian ini, komitmen aparatur mendorong ASN untuk tetap menjalankan tugas pembinaan dan pendampingan meskipun menghadapi berbagai kendala.

Dukungan pemerintah desa dan keaktifan kader juga berperan dalam memperluas jangkauan kegiatan. Pemerintah desa membantu menyediakan dukungan kelembagaan dan fasilitas, sedangkan kader membantu penyampaian informasi serta menghubungkan ASN dengan masyarakat. Kasmir (2019) menjelaskan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi pula oleh dukungan lingkungan kerja. Dengan demikian,

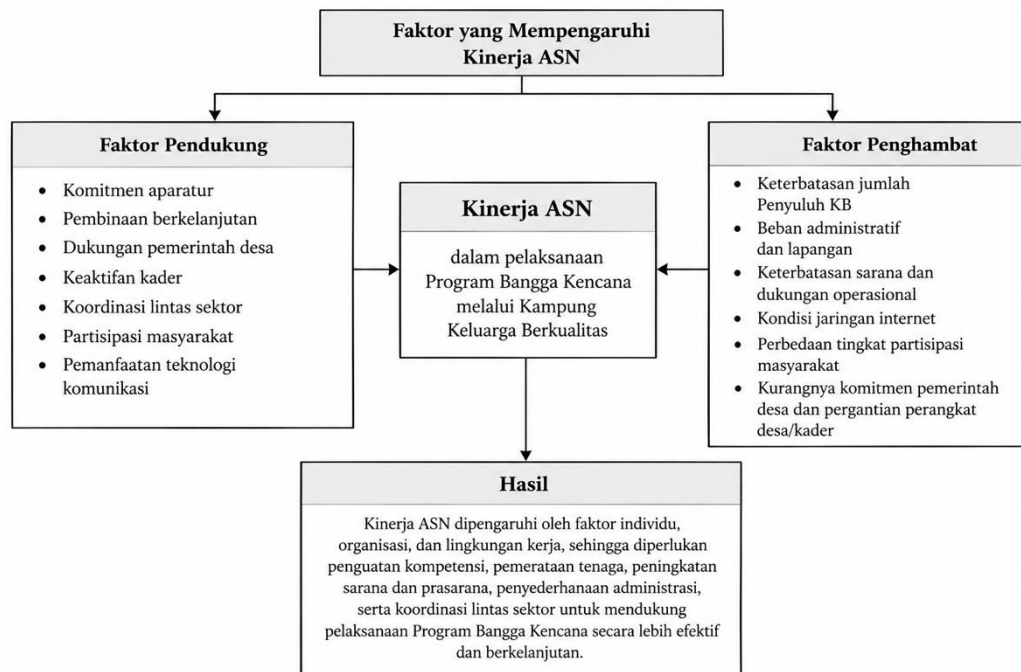
dukungan desa dan kader menjadi bagian penting dalam menunjang pelaksanaan tugas ASN.

Koordinasi lintas sektor menjadi faktor pendukung lainnya karena Program Bangga Kencana memiliki keterkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pembangunan keluarga, dan pemberdayaan masyarakat. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa collaborative governance memungkinkan berbagai pihak menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas untuk mencapai tujuan bersama. Dalam penelitian ini, koordinasi membantu ASN mengatasi keterbatasan sumber daya melalui pembagian peran dengan berbagai pemangku kepentingan.

Partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi komunikasi turut mendukung kinerja ASN. Masyarakat yang aktif membuat proses pembinaan dan pendampingan lebih mudah dilakukan, sedangkan teknologi membantu mempercepat penyampaian informasi, koordinasi, dan pelaporan. Namun, manfaat teknologi masih dipengaruhi oleh kondisi jaringan internet yang belum merata. Perbedaan karakteristik masyarakat juga menuntut ASN untuk menggunakan pendekatan komunikasi yang adaptif.

Di sisi lain, faktor penghambat utama adalah keterbatasan jumlah Penyuluh KB dibandingkan luas wilayah binaan, tingginya beban administratif dan pekerjaan lapangan, keterbatasan sarana serta dukungan operasional, kondisi jaringan internet, dan perbedaan tingkat partisipasi masyarakat. Beban administratif yang tinggi dapat mengurangi waktu ASN untuk melakukan pendampingan langsung di masyarakat sehingga diperlukan pengelolaan waktu dan penyederhanaan sistem pelaporan.

Hambatan lainnya adalah perbedaan komitmen pemerintah desa serta pergantian perangkat desa dan kader. Ketika dukungan desa kuat, kegiatan dapat berjalan lebih mudah, sedangkan dukungan yang terbatas dapat menghambat keberlanjutan program. Pergantian personel juga dapat menyebabkan pengetahuan mengenai program tidak berlanjut sehingga ASN perlu melakukan sosialisasi dan koordinasi kembali.



Gambar 2 Bagan Faktor yang Mempengaruhi Kinerja ASN

Secara keseluruhan, faktor pendukung dan penghambat menunjukkan bahwa kinerja ASN merupakan hasil interaksi antara faktor individu, organisasi, dan lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan kinerja tidak cukup dilakukan melalui penguatan kompetensi aparatur, tetapi juga melalui pemerataan tenaga Penyuluh KB, peningkatan dukungan operasional, penguatan sarana dan prasarana, penyederhanaan administrasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan peran pemerintah desa, kader, dan masyarakat.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya DPPKB Kabupaten Karawang dalam Meningkatkan Kinerja ASN

DPPKB Kabupaten Karawang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja ASN dalam pelaksanaan Program Bangsa Kencana melalui Kampung Keluarga Berkualitas. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kompetensi, pelatihan, pembinaan, coaching, mentoring, monitoring dan evaluasi, penguatan koordinasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, DPPKB juga perlu memperhatikan pemerataan beban kerja, penguatan kapasitas kader, dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa agar jangkauan pembinaan dan pendampingan dapat lebih luas. Upaya tersebut penting karena ASN, khususnya Penyuluh KB, berhadapan langsung dengan masyarakat dan memiliki tugas yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pembinaan, pendampingan, fasilitasi, pengumpulan data, dan koordinasi.

Peningkatan kompetensi menjadi salah satu upaya utama karena pelaksanaan Program Bangga Kencana membutuhkan kemampuan teknis sekaligus kemampuan komunikasi dan adaptasi sosial. Pelatihan dan pembinaan diarahkan agar ASN mampu memahami perkembangan kebijakan, mengelola data, menggunakan teknologi, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta menyelesaikan persoalan yang muncul di wilayah binaan. Armstrong (2020) menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam meningkatkan kemampuan individu sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, pengembangan kompetensi ASN perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan.

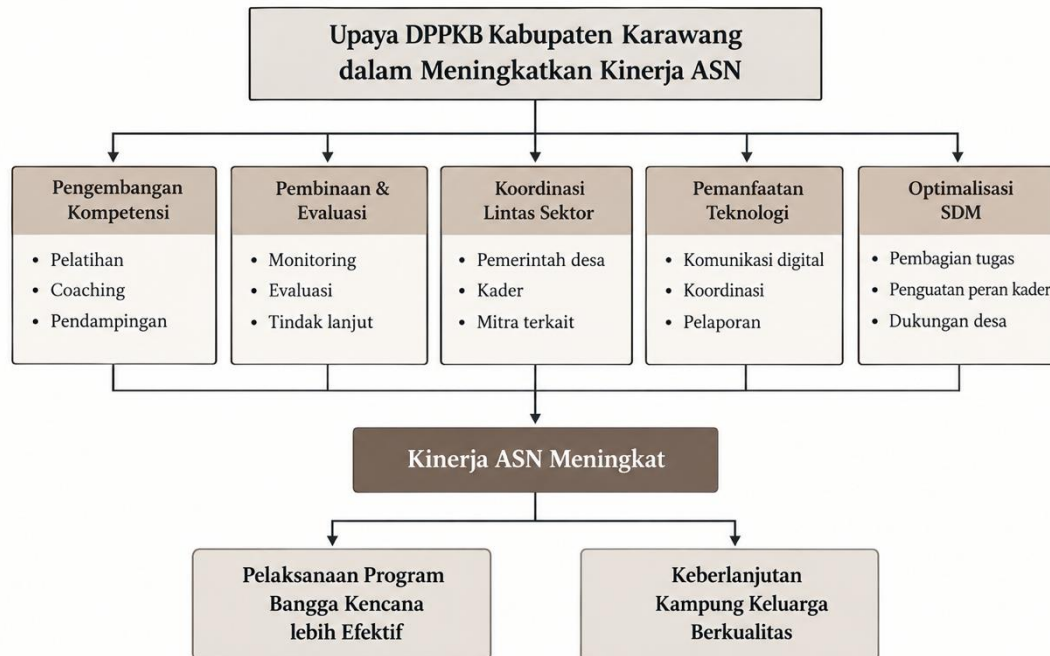
Monitoring dan evaluasi juga menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai dasar untuk mengetahui capaian, mengidentifikasi hambatan, dan menentukan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan berikutnya. Bernardin dan Russell (2013) menjelaskan bahwa penilaian kinerja diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pegawai mampu memenuhi standar dan tujuan pekerjaan sekaligus menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pengembangan pegawai. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dapat menjadi instrumen pembinaan untuk menjaga kualitas kinerja ASN.

Penguatan koordinasi internal dan lintas sektor juga diperlukan karena Program Bangga Kencana melibatkan berbagai aspek pembangunan dan tidak dapat dilaksanakan oleh DPPKB secara sendiri. Koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, dan kelompok masyarakat dilakukan untuk menyelaraskan kegiatan, membagi peran, serta menyelesaikan persoalan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Agranoff dan McGuire (2003) menjelaskan bahwa organisasi publik dalam lingkungan yang kompleks perlu memiliki kemampuan membangun dan mengelola hubungan dengan organisasi serta aktor lainnya. Dalam konteks penelitian ini, koordinasi menjadi sarana untuk menggabungkan sumber daya dan kapasitas berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi upaya lain yang mendukung efektivitas kerja ASN, khususnya dalam komunikasi, koordinasi, penyampaian informasi, dan pelaporan. Namun, optimalisasi teknologi tetap membutuhkan dukungan jaringan dan sarana yang memadai. Selain itu, penataan beban kerja diperlukan untuk mengurangi ketimpangan antara jumlah tenaga penyuluh dan luas wilayah binaan. Penguatan peran kader dan pemerintah desa juga menjadi bagian penting karena keduanya dapat membantu memperluas jangkauan pembinaan ketika kapasitas ASN terbatas.

Secara keseluruhan, upaya peningkatan kinerja ASN DPPKB Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa pengembangan kinerja perlu dilakukan melalui pendekatan yang menggabungkan peningkatan kompetensi individu dengan penguatan dukungan organisasi. Mangkunegara (2017) menjelaskan bahwa kinerja dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi, sehingga peningkatan kinerja perlu disertai pembinaan, dukungan pimpinan, fasilitas kerja, dan lingkungan organisasi yang kondusif. Temuan

penelitian juga menunjukkan bahwa strategi peningkatan kinerja perlu bersifat berkelanjutan dan adaptif karena karakteristik wilayah, masyarakat, dan kapasitas kelembagaan desa berbeda-beda.



Gambar 3 Proses Upaya DPPKB Kabupaten Karawang

Berdasarkan enam dimensi Bernardin dan Russell (2013), kinerja ASN DPPKB Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana melalui Kampung Keluarga Berkualitas secara keseluruhan dapat dinilai cukup baik. Kekuatan terlihat pada kemampuan pembinaan, adaptasi terhadap kondisi lapangan, koordinasi, komunikasi, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, aspek yang masih perlu diperkuat meliputi pemerataan tenaga Penyuluh KB, pengelolaan beban kerja, dukungan sarana dan operasional, serta optimalisasi teknologi. Dengan penguatan aspek tersebut secara berkelanjutan, kinerja ASN diharapkan semakin mampu mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana melalui Kampung Keluarga Berkualitas secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan enam dimensi kinerja Bernardin dan Russell, yaitu kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, ketepatan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan terhadap pengawasan, dan dampak interpersonal, dapat disimpulkan bahwa kinerja ASN DPPKB Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana melalui Kampung Keluarga Berkualitas secara umum telah berjalan dengan baik. ASN, khususnya Penyuluh KB, mampu melaksanakan pembinaan,

pendampingan, penyuluhan, pendataan, koordinasi, monitoring, dan pelaporan. Kinerja tersebut terlihat dari kemampuan menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi lapangan, mengoptimalkan sumber daya, bekerja secara relatif mandiri dengan tetap berada dalam pengawasan organisasi, serta membangun hubungan kerja dengan kader, pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Faktor pendukung kinerja ASN meliputi kompetensi dan pengalaman aparatur, dukungan pimpinan, koordinasi dengan pemerintah desa, keberadaan kader dan pengelola Kampung Keluarga Berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi, kerja sama lintas sektor, serta partisipasi masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah Penyuluh KB, luas wilayah binaan, beban kerja, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, kendala jaringan komunikasi, perbedaan karakteristik dan partisipasi masyarakat, serta dinamika kegiatan di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja ASN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh dukungan organisasi dan lingkungan kerja.

Upaya DPPKB Kabupaten Karawang dalam meningkatkan kinerja ASN dilakukan melalui penguatan kompetensi dan pembinaan, peningkatan koordinasi serta monitoring dan evaluasi, optimalisasi peran Penyuluh KB dan kader, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kerja sama dengan pemerintah desa dan lintas sektor, serta pengelolaan sumber daya berdasarkan skala prioritas. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, ketepatan waktu, kemandirian, dan kemampuan interpersonal ASN dalam menjalankan tugas. Penguatan kapasitas kader dan pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan program dan mengatasi keterbatasan wilayah serta sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative public management: New strategies for local governments*. Georgetown University Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032> (DOI)
- Armstrong, M., & Taylor, S. (2020). *Armstrong's handbook of human resource management practice* (15th ed.). Kogan Page. ([WorldCat](#))
- Bernardin, H. J., & Russell, J. E. A. (2013). *Human resource management: An experiential approach* (6th ed.). McGraw-Hill/Irwin. ([WorldCat](#))
- Kasmir. (2019). *Manajemen sumber daya manusia: Teori dan praktik* (Cet. 5). Rajawali Pers.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2017). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan* (Cet. 14). Remaja Rosdakarya.
- Sinambela, L. P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia: Membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja*. Bumi Aksara. ([PERPUSTAKAAN](#))
- Wibowo. (2017). *Manajemen kinerja* (Ed. 5). Rajawali Pers. ([E-Pustaka Dprd Sumbar](#))
- Sumber peraturan/dokumen yang dapat dimasukkan

- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*.
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. (2024). *Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang Tahun 2024*.
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. (2026). *Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang Tahun 2026*.